



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI**  
**PAPUA**

**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 MERAUKE**

Jl. TMP Trikora No. 84, Merauke 99616; TELEPON (0971) 321912; FAKSIMILI (0971) 321812; SUREL  
kppnmerauke@kemenkeu.go.id; SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/merauke](http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/merauke)

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-232/KPN.3402/2026**

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua  
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Merauke  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Bulanan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua  
Selatan Periode Bulan Maret 2026  
Tanggal : 9 April 2026

Sehubungan dengan Pengelolaan Administrasi pada Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan BPP Provinsi Papua Selatan Bulan Maret Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Asyik Fauzi





# LAPORAN BULANAN BP3OKP PAPUA SELATAN

Maret 2026



OLEH:  
TIM BP3OKP PAPUA SELATAN





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan Februari 2026 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selama bulan Februari 2026, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan.

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan, serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif.

**Merauke 10 Maret 2025**

**Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan**

**Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd.M.Si, MRSC**

**NIP: 999920240117145257**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1    Maksud dan Tujuan .....	5
1.2    Ringkasan Kelembagaan .....	5
1.2.1    Landasan/Dasar Aturan.....	5
1.2.2    Definisi .....	6
1.2.3    Struktur Kelembagaan .....	6
1.2.4    Tugas dan Fungsi .....	6
1.2.5    Ruang Lingkup Kegiatan.....	7
1.2.6    Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan	8
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN.....	9
2.1    Rekapitulasi Kegiatan.....	9
BAB III PENUTUP .....	25
3.1    Kesimpulan.....	25
3.3    . Penutup .....	26



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 1.</b> Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022.....	6
---	---



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1. 1.** Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan .....8



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan**

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Daerah adalah untuk mengakomodir seluruh Aspirasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah diusulkan pada Musrembang OTSUS tahun 2025 yang harus dikerjakan pada tahun 2026, dan target program Kerja tahun ini harus direalisasikan sesuai target-target yang sudah ditetapkan, sehingga kami minta Komitmen Kementerian terkait untuk mendukung program Kerja ini.

#### **1.2 Ringkasan Kelembagaan**

##### **1.2.1 Landasan/Dasar Aturan**

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
- 5) Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- 6) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
- 7) Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER- 2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

### 1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### 1.2.3 Struktur Kelembagaan



**Gambar 1 1.** Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022

### 1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:



- a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan
- c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

### **1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Anggota BPP beserta Pokja BPP PPS dalam pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan pelaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara general, sebagai berikut:

#### **a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan**

- Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah terkait Otsus.
- Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

#### **b. Harmonisasi Data dan Informasi**

- Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.



**c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program**

pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..

**d. Koordinasi Internal dan Eksternal**

- Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..

**e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya**

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan dan keberlanjutan program.

**f. Pelaporan dan Transparansi**

- Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan.
- Menyebarkan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara berkala dan terbuka.

**1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan**

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan, di bawah :

**Tabel 1. 1.** Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

NO. UNIT KERJA & JABATAN			JLH ORG
1.	Pimpinan	: Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan	1 org
2.	Kelompok Kerja (POKJA)	: 1. POKJA Papua Sehat	1 org
		: 2. POKJA Papua Cerdas	1 org
		: 3. POKJA Papua Produktif	1 org
		: 4. POKJA Papua Polhukam	- org

NO.	UNIT KERJA & JABATAN	JLH ORG
3.	Pendukung Administratif : TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke Provinsin Papua Salatan	3 org
4.	Staf/ Karyawan : Staf/karyawan yang diperbantukan kepada BP3OKP yaitu karyawan PPNPN	3 org

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

### 2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Anggota BPP dan Pokja Sehat pada bulan Februari 2026

terurai sebagai berikut:

- 1. Notulen Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua pada tanggal 9 Februari 2026**





- a. Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Tata Kelola Pendidikan Dasar di Seluruh Indonesia bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
- Pada saat diskusi dengan pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta salah satu point yang kami diskusikan adalah berkaitan dengan penyebaran dan distribusi guru-guru di seluruh sekolah-sekolah Negeri dan Swasta yang ada di seluruh Indonesia harus Merata karena Proses Belajar mengajar harus merata, tidak boleh ada diskriminasi antara Sekolah-sekolah Swasta dan Negeri karena Pendidikan yang comprehensive harus diberikan untuk seluruh anak Bangsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan bermutu untuk semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045, Konsolidasi Nasional bertujuan untuk membangun sinergi, kesepahaman, dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam pencapaian target pembangunan pendidikan. Pada tahun 2026, Konsolidasi Nasional akan mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”
- 2. Notulen Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua pada tanggal 10 Februari 2026**



#### **a. Menteri Dalam Negeri**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 :

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagai manadi maksud pada ayat(1) memuat:

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. Prioritas pembangunan daerah;
  - c. Rencana kerjadan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
  - d. Program Strategis Nasional; dan
  - e. Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025.
- (3) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD 2025-2029.
- (4) Bagi daerah yang Kepala Daerah masih dijabat oleh pejabat Kepala Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagai manadi maksud pada ayat (1) menggunakan RPD atau RPJMD yang masih berlaku dengan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045.
- (5) Dalam hal Daerah telah memiliki Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah, dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan atau penyesuaian terhadap rancangan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada RPJMD Tahun 2022-2027.
- (7) Penyusunan RKPD Tahun 2026 diinput dan diproses kedalam SIPD.


**POSTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN 2026**

	RAPBN	KESEPAKATAN DPR
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>		<b>3.153,58</b>
1. Penerimaan Perpajakan	2.692,02	2.693,71
2. PNBPN	455,00	459,20
3. HIBAH	0,66	0,66
<b>B. BELANJA NEGARA</b>		<b>3.842,73</b>
1. Belanja Pemerintah Pusat	3.136,49	3.149,73
• Belanja K/L	1.498,25	1.510,55
• Belanja Non K/L	1.638,24	1.639,19
2. Transfer ke Daerah	649,99	692,99
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(39,37)</b>	<b>(89,71)</b>
<b>D. SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(638,81)</b>	<b>(689,15)</b>
% terhadap PDB	(2,48)	(2,68)
<b>E. PEMBIAYAAN</b>	<b>(638,81)</b>	<b>(689,15)</b>

**b. Pembiayaan Pendidikan Melalui APBD, Menteri Keuangan**

Pembiayaan pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah.


**UPAYA PERBAIKAN**

1. Pemerintah terus **mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan guna meningkatkan akses dan kualitas**, pemerataan bagi seluruh masyarakat serta mendorong semakin **link and match** dengan **pasar tenaga kerja**.
2. Peningkatan **kualitas tenaga pendidik dan pemerataan** tenaga pendidikan di seluruh wilayah
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
4. Mendorong penguatan **sinergi pendanaan APBN, APBD dan Swasta secara proporsional**.

**c. Belanja Negara (APBN), Menteri PPN/Kepala Bappenas**



## VISI INDONESIA EMAS 2045

Visi RPJPN 2025-2045 "NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"

Visi RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

TRISULA PEMBANGUNAN

# 1

**Penurunan Kemiskinan**

# 2

**Peningkatan SDM Indonesia yang Berkualitas**

# 3

**Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**

**Basaran Utama Pembangunan**

**1 Pendapatan per Kapita setara Negara Maju**

- ✓ Pertumbuhan Ekonomi 8%
- ✓ GNI per kapita 8.000 USD
- ✓ PDB Maritim 9,1%
- ✓ PDB Manufaktur 21,8%

**2 Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang**

- ✓ Tingkat Kemiskinan 4,5-4,8%
- ✓ kemiskinan ekstrem <0,5% (2036)
- ✓ Rasio gini 0,372-0,375
- ✓ PDRB GTI menjadi 22,4%

**3 Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat**

- ✓ Global Power Index **naik** 29

**4 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat**

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMI) 0,59

**5 Integritas emisi GRK menurun menuju net zero emission**

- ✓ intensitas emisi GRK 45,17%
- ✓ Indeks Kualitas Lingkungan 77,20

---

## Pembangunan Pendidikan Indonesia

"Pendidikan bertujuan untuk membangun peradaban bangsa dengan mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik sebagai landasan membentuk masyarakat yang demokratis dan berkeadilan"

### UUD 1945 Pasal 31

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah, serta kewajiban negara mengusahakan sistem pendidikan nasional.

### RPJPN 2025-2045

Dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", pendidikan berperan penting dalam mewujudkan SDM unggul, berkualitas, dan produktif melalui pendidikan berkualitas yang merata.

### RPJMN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Trisula Pembangunan, khususnya pilar Sumber Daya Manusia Berkualitas, melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan



## Sasaran Pembangunan Pendidikan Tahun 2045



## Program Prioritas Bapak Presiden dalam Pembangunan Pendidikan

"... kita harus fokus kepada investasi paling penting bagi rakyat kita, investasi kepada anak-anak kita, sumber daya manusia kita...."

Sumber: Pidato Presiden/Pembaca Survei Opini Rakyat (Siang-Kelompok) Periode 30 Oktober 2023



MAKAN BERGIZI GRATIS	REVITALISASI SEKOLAH DAN MADRASAH	DIGITALISASI PENDIDIKAN	SMA LINGGUL GARUDA	SEKOLAH RAKYAT	SEKOLAH TERINTEGRASI
MBG bertujuan membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas	Mendukung pemerataan fasilitas TIK, perluasan akses materi, penguatan kemampuan, integrasi layanan digital pendidikan serta mendorong penggunaan teknologi	Sekolah unggul bertujuan mengembangkan peserta didik berdaya saing global	Sekolah Rakyat bertujuan mencetak agen perubahan dari keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas	Sekolah Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan



### Arahan dalam Mendukung Program Prioritas Bapak Presiden

- 01** Memastikan perencanaan daerah selaras dengan perencanaan nasional serta menjamin efektivitas pelaksanaan program
- 02** Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Revitalisasi Sekolah dan Madrasah
- 03** Mendukung Program Digitalisasi Pendidikan
- 04** Memberikan dukungan terhadap Prioritas Presiden dalam pendirian satuan pendidikan, yaitu Sekolah Terintegrasi, SMA Unggul Garuda, dan Sekolah Rakyat
- 05** Memperkuat peran pemerintah daerah dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS)
- 06** Mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- 07** Memastikan pemenuhan alokasi Anggaran Pendidikan 20% APBD serta menjamin ketepatan penggunaannya

d. Menteri PAN dan RB

## Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Reformasi Birokrasi

"bersama menuju Indonesia Emas 2045"

**Responsivitas Birokrasi**

Dinilai lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat

**Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran**

Perkuat nilai-nilai integritas dan etika kerja di lingkungan kerja. Pengawasan secara internal agar ada kepatuhan yang tinggi dalam bekerja

**Percepatan Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan yang lebih diarahkan dengan cepat dan tepat

**PENGELOLAAN ASN**

Membentuk disiplin dan produktivitas optimal, serta meningkatkan pengetahuan keprofesional

**Penguatan Koordinasi Antarlembaga**

Membangun sinergi dan kolaborasi antar lembaga dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga

**Pelayanan Berbasis Teknologi**

Penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan akses ke layanan dasar

**Efektivitas Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran diprioritaskan ke arah dan mendukung program prioritas, mengoptimalkan anggaran yang tidak berdampak langsung pada rakyat

**Reformasi Pelayanan Publik**

Transformasi pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan dalam melayani masyarakat



## Asta Cita

Presiden Prabowo & Wapres Gibran

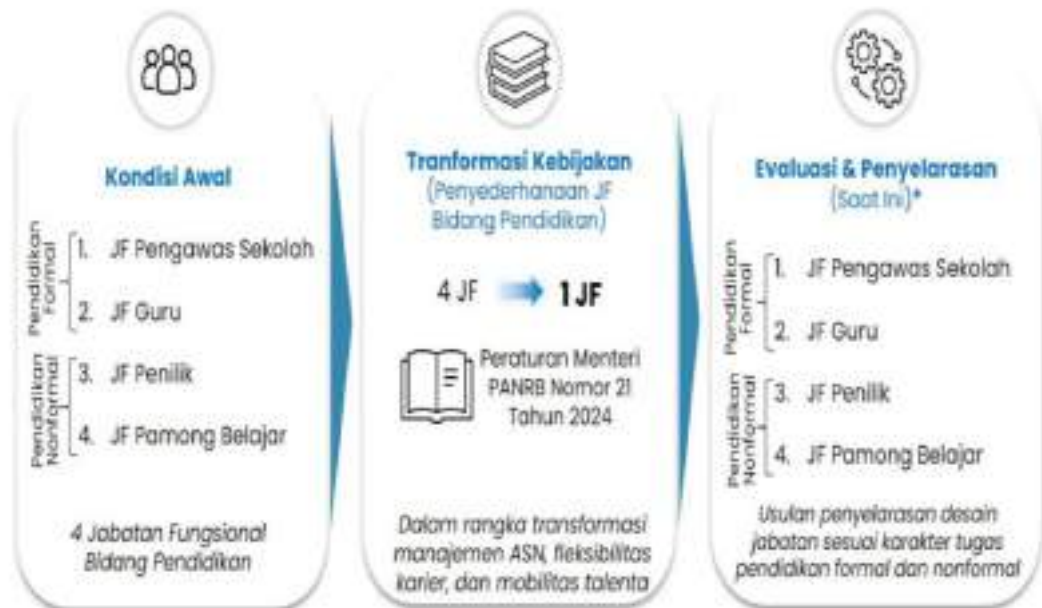
1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
3. Menetapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui penguatan pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemerataan pendidikan
5. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
6. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
7. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan pangan, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai keadilan yang adil dan damai



**POSTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN 2026**

	RAPBN	KESEPAKATAN DPR
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>		<b>3.153,58</b>
1. Penerimaan Perpajakan	2.692,02	2.693,71
2. PNBP	455,00	459,20
3. HIBAH	0,66	0,66
<b>B. BELANJA NEGARA</b>		<b>3.842,73</b>
1. Belanja Pemerintah Pusat	3.136,49	3.149,73
• Belanja K/L	1.498,25	1.510,55
• Belanja Non K/L	1.638,24	1.639,19
2. Transfer ke Daerah	649,99	692,99
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(39,37)</b>	<b>(89,71)</b>
<b>D. SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(638,81)</b>	<b>(689,15)</b>
% terhadap PDB	(2,48)	(2,68)
<b>E. PEMBIAYAAN</b>	<b>(638,81)</b>	<b>(689,15)</b>

**DINAMIKA PENATAAN JABATAN FUNSIONAL BIDANG PENDIDIKAN**



\*Dalam pembahasan lintas kementerian dan pemangku kepentingan



## PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL GURU

### TUGAS DAN RUANG LINGKUP

Melakukan kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta pelaksanaan tugas tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan.



### KEDUDUKAN:

Pelaksana teknis kegiatan di bidang pendidikan pada instansi Pemerintah

### Pengembangan Karier Dalam/Di Luar JF Guru:

- Kepala Sekolah (Tugas Tambahan)/Manajerial di Lingkungan Sekolah/Pendidikan
- JPT, Administrator atau Pengawas
- Pengawas Sekolah

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	TINGKAT	BESARAN TUNJANGAN	KETERANGAN
1	GURU	UTAMA	Rp 589.000,00 – Rp 640.000,00	[Terdaftar Tambahan Tunjangan Profesi]
		MADYA	Rp 289.000,00 – Rp 340.000,00	
		MUDA	Rp 127.000,00 – Rp 170.000,00	
		PERTAMA	Rp 127.000,00 – Rp 170.000,00	
2	PENGAWAS SEKOLAH	UTAMA	Rp 640.000,00 – Rp 720.000,00	[Terdaftar Tambahan Tunjangan Profesi]
		MADYA	Rp 440.000,00 – Rp 520.000,00	
		MUDA	Rp 481.000,00 – Rp 490.000,00	
		PERTAMA	Rp 481.000,00 – Rp 490.000,00	
3	PANGKAS BELAJAR	MADYA	Rp 1.000.000,00	-
		MUDA	Rp 750.000,00	
		PERTAMA	Rp 500.000,00	
4	PENJEL	UTAMA	Rp 1.200.000,00	-
		MADYA	Rp 1.200.000,00	
		MUDA	Rp 800.000,00	
		PERTAMA	Rp 570.000,00	

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017

## PENGEMBANGAN KARIER GURU

KUALIFIKASI PENDIDIKAN  
SARJANA/DIPLOMA EMPAT  
BERSERTIFIKAT PROFESI PENDIDIK

### KARIER JF GURU



- Non Manajerial
- Manajerial



- e. Materi: Tata kelola guru, **Menteri Agama**  
Tata Kelola Guru Agama di Sekolah Umum, dan Penerapan Pendidikan Karakter

## Tata kelola Guru Agama di Sekolah Umum, dan Penerapan Pendidikan Karakter

### KONSOLIDASI NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2026



2

## Dasar Hukum

1. Amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang diikutinya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 (Tidak/belum ada status pencabutan PP ini pada peraturan perundang-undangan berikutnya).

### Amanah PP 55/2007

tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menjelaskan pada pasal 3 ayat (1) bahwa Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Dan ayat (2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**REVISI DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN**

**REVISI DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN AGAMA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan

Materi Pokok

Materi Pokok

1. Pendidikan agama dan keagamaan meliputi:

- a. pendidikan agama Islam bagi umat Islam;
- b. pendidikan agama Kristen bagi umat Kristen;
- c. pendidikan agama Katolik bagi umat Katolik;
- d. pendidikan agama Buddha bagi umat Buddha;
- e. pendidikan agama Hindu bagi umat Hindu;
- f. pendidikan agama lain yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat umum;

2. Penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan dilaksanakan oleh Menteri Agama.

## Guru Pendidikan Agama Nasional

Total Guru Pendidikan Agama

**316.195**

Status Kepegawaian



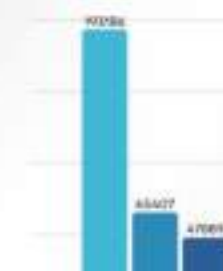
Berdasarkan Agama



Sertifikasi



Jenjang Pendidikan

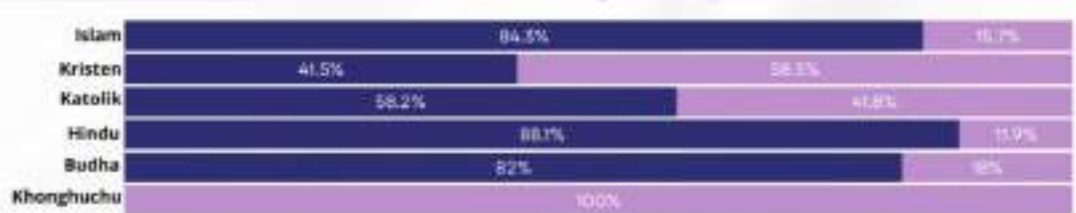


Instansi yang Mengangkat

Kemendiknas	90.181	3,21 %
Kemendikbud	20.892	6,61 %
Kementerian Lain	863	0,27 %
Pemerintah Daerah	187.401	59,27 %
Komite Sekolah	6.588	2,06 %

## Guru Pendidikan Agama Nasional

Data Rincian : Sertifikasi



Data Rincian : Jenjang

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghuc	Total
TK	7.144	196	52	451	18	8	7.869
SD	155.576	26.367	9.995	253	981	14	193.186
SMP	48.378	11.384	4.865	288	420	72	65.407
SMA/SMK	36.106	7.696	3.488	218	305	76	47.889
SLB	1.452	98	58	212	1	0	1.821
SR	21	0	0	0	2	0	23
<b>Total</b>	<b>248.677</b>	<b>45.741</b>	<b>18.458</b>	<b>1.422</b>	<b>1.727</b>	<b>170</b>	<b>316.195</b>

## TANTANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA

### PROBLEMATIKA PENDIDIKAN KRISTEN, KATOLIK, HINDU, BUDDHA, DAN KHONGHUCU

- Pengangkatan guru Pendidikan Agama Buddha oleh satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum terdapat kebijakan tentang pengangkatan tersebut.
- Proses pengurusan dan validasi bagi Guru Agama Khonghucu mengalami kendala karena belum adanya guru agama khonghucu dalam pengantar dan formulir.
- 6767 Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang lulus seleksi Berkas Tahun 2023 ditugaskan Tersempit.

### PENGANGKATAN GURU TIDAK MELIBATKAN KEMENDIKNAS

Partisipasi Kementerian Agama penting untuk memastikan bahwa guru yang diangkat memiliki latar belakang keagamaan, sertifikasi, dan pemahaman ajaran agama yang memadai, sekaligus sejalan dengan prinsip moderasi beragama.

### KURANGNYA GURU AGAMA

Masih terdapat kekurangan guru agama di sekolah. Sehingga sejumlah guru agama harus mengisi mata pelajaran keguruan yang tidak sesuai dengan latar belakang agamanya.

ISU STRATEGIS: PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH			25
NO	ISU STRATEGIS	BASIS MASALAH/DATA PENDUKUNG	INDIKATOR/RANCANGAN USULAN
1	Jumlah Guru PA dan Pengawas PA di Sekolah Umum	Kurangnya Guru PA dan Pengawas PA di Sekolah Umum	Pengangkatan Guru PA, Pengawas PA di Sekolah Umum, dan Dosen PA pada Perguruan Tinggi Umum 1. Rasio Guru PA dengan Siswa Muslim di Sekolah Umum: <b>248.667</b> Guru : 4.180.439 Siswa = 1 Guru mengajar 169 Siswa 2. Rasio Pengawas PA: <b>1.787</b> : Guru PA <b>248.667</b> = 1 Pengawas PA mengawasi 139 Guru Muslim PA
2	Basis Pengangkatan Guru PA di Sekolah Umum	Banyaknya Verbal Instansi yang mengangkat Guru PA di Sekolah Umum yang berdampak pada pembinaan, karir, dan kesejahteraan Guru PA di Sekolah Umum	1. Kembali Pengangkatan GRAJ Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 2. Diperjelas Kewenangan dalam RUU Sistemasi dan Peraturan Pemerintah 3. Surat Keputusan/Edaran Bersama (SKB/SEB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PAN-RB
3	Berkurangnya Kompetensi Baca Qur'an di Sekolah dan Literasi Dasar Beragama di Sekolah Umum	Data Survey : Kerjasama Kemendiknas, Universitas FTIQ dan BRIN a. GPAJ Mahir baca Qur'an : 11,3% dan Siswa Mahir baca Qur'an : 9,2% b. Indeks Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Lemahnya Aspek Afektif dalam Sikap Kevelatan dan Sikap terhadap Budaya bagi Siswa di Sekolah serta Lemahnya Aspek Afektif dalam Sikap Kesetaraan dan Sikap terhadap Negara bagi GPAJ di Sekolah Umum	Program Peningkatan Literasi Baca Tulis Al-Qur'an bagi GPAJ dan Siswa Muslim di Sekolah dan Penguatan Literasi Dasar Beragama di Sekolah pada Aspek Afektif
4	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru dan Pengawas PA aktif	1. Persepsi baik dan Opini Lulus Sertifikasi (PPG) capaian Kompetensi Final bagi Guru dan Pengawas PA 2. Tidak adanya antara sertifikasi dan Kualitas Mutu Pendidikan PA 3. Belum SI bagi GPAJ	1. Peningkatan SI bagi GPAJ (9.753 GPAJ) 2. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) bagi Guru dan Pengawas PA (Lanjutan PPG)

### 3. Notulen rapat kegiatan tanggal 12 Februari 2026 pertemuan dengan DPD RI di di Jakarta



BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan dan Papua Barat Daya diskusi beberapa hal strategis berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS, Persentase Dana OTSUS, Masalah MBG, Koerasi Merah Putih dan Fungsi Pengawasan yang efektif di Daerah berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS agar tepat sasaran dan efektif dirasakan oleh Orang Asli Papua.

Selain itu kami juga mendiskusikan bagaimana Kolaborasi, dan bersinergi antara BP3OPK, DPD RI, MRP dan Pemerintah daerah yang ada wilayah Papua, termasuk tugas dan tanggungjawab dari Komite Eksekutif sebagai satu kesatuan lembaga yang dapat berperan penting didalam fungsi koordinasi di Pusat dan daerah.

### 4. Notulen rapat kegiatan tanggal 13 Februari 2026 pertemuan dengan Dirljen Bina Marga PU RI



Diskusi dengan Dirjen Bina Marga PU RI berkaitan dengan Konektivitas Pembangunan Jalan Trans Papua dari Merauke – Sorong, dengan prioritas daerah-daerah perbatasan dan jalan-jalan strategis Nasional yang dikerjakan langsung oleh BPJN Bina Marga di daerah, dan ada beberapa point penting yang menjadi fokus diskusi:

- a. Pesan Bapak Dirjen Bina Marga kepada Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan agar tolong direalisasi konektivitas Jalan PSN dari Wanam – Sungai Bian – Muting harus terhubung.
- b. Lebar badan Jalan kiri dan kanan harus ada ruang sebesar 4 Meter untuk proteksi Badan Jalan dari longsor
- c. Meyakinkan Masyarakat Adat agar bekerjasama mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional terutama pemberian akses jalan dan pembukaan lahan untuk Sawah.
- d. Koridor Jalan harus terhubung dengan Jalan Nasional untuk memudahkan konektivitas Jalan Kabupaten, Provinsi dan Jalan Nasional.
- e. Penyerahan Proposal Perencanaan dari PU Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.

**5. Notulen kegiatan tanggal 25 Februari 2026 Diskusi Strategis Penguatan SDM Papua Selatan bersama Mata Garuda Papua Selatan**





### 1. Sinergi dan Kolaborasi Kelembagaan

a) Pertemuan ini bertujuan membangun sinergi program kerja yang selaras dengan fokus BPP, khususnya pada Pokja Papua Cerdas dan Pokja Papua Sehat

b) Mata Garuda berkomitmen

menjadi jembatan penghubung antara generasi muda, komunitas akademik, dan pemerintah daerah

c) Direncanakan adanya kolaborasi kemitraan antara Mata Garuda dengan Pokja Perempuan (Majelis Rakyat Papua), OPD terkait (seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan), serta Pokja Sehat

### 2. Sosialisasi dan Pengembangan Beasiswa LPDP

a) Koordinasi Seminar: Team Mata Garuda berkoordinasi dengan BPP untuk menyelenggarakan seminar besar mengenai sosialisasi beasiswa LPDP.

b) Ketentuan Penerima: Kepala BPP menjelaskan tiga klasifikasi syarat penerima LPDP di wilayah ini:

c) Khusus OAP: Tanpa syarat TOEFL.

d) Penduduk Lama: Sudah lama tinggal di Papua (menggunakan TOEFL).

e) Pendetang: Saudara-saudara dari luar Papua (menggunakan TOEFL).

f) Perluasan Jenjang: Kepala BPP menyarankan agar pengelolaan LPDP tidak hanya fokus pada jenjang S2 dan S3, tetapi juga mencakup jenjang S1

### 3. Program Penguatan Kapasitas

a) Akan dibentuk kelas persiapan khusus sesuai bidang bagi siswa kelas 2 dan kelas 3 (SMA/ sederajat) untuk mempersiapkan mereka mengakses beasiswa.

b) Program dirancang berbasis gagasan, riset, dan kebutuhan riil masyarakat agar memberikan dampak langsung yang berkelanjutan, bukan sekadar seremonial

## RAPAT KORDINASI SINKRONISASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA SESUAI RAPP Biak, 5-7 Maret 2026

### A. Substantif

#### 1. Isu Strategis Bersama Satu Papua

Setiap Kelompok Kerja (Pokja) menyampaikan dan membahas isu-isu strategis dalam kerangka “Satu Papua” sesuai fokus bidang masing-masing, guna memastikan keterpaduan arah kebijakan, sinkronisasi program, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

#### 2. Kesepakatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Forum SHEK

Perlu dilakukan penegasan dan penyelarasan Forum SHEK sebagai instrumen koordinasi tematik. Contoh implementasi sebagai berikut:

- Forum SHEK Papua Sehat: Forum SHEK HIV/AIDS;



- Forum SHEK Papua Cerdas: koordinasi K/L mengenai distribusi Guru ASN PPPK ke sekolah negeri yang berdampak pada kekosongan guru di sekolah swasta, hasilnya adalah Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025;



- Forum SHEK Papua Produktif: Forum SHEK terkait Koordinasi Penggunaan Kawasan Hutan di Areal Konservasi Kabupaten Tambrauw yang melibatkan berbagai pihak, antara lain Pemda Papua Barat Daya, Pemda Tambrauw, Ketua DPR Tambrauw, LSM ASRI, BBKSDA, dan pihak terkait lainnya.



- Forum SHEK Papua Polhukam/Damai: pendampingan strategis Papua Damai dan Papua Produktif di wilayah Maybrat dan Teluk Bintuni, hasilnya adalah: ruas jalan koridor Susumuk-Teluk Bintuni.



### 3. Target dan Capaian Kinerja Pokja di Tanah Papua

Perlu pembahasan terkait target serta capaian kinerja masing-masing Pokja dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua.



#### **4. Format Forum SHEK**

Perlu pembahasan dan penyepakatan format Forum SHEK sebagai pedoman bersama seluruh Pokja dan Anggota BPP.





## **B. Administratif**

### **1. Rencana Kerja Tahun 2026**

Rencana/program kerja BPP Papua Barat Daya tahun 2026 terlampir:  
<https://drive.google.com/file/d/1Ty14DMEvzpWhaPHEDxuxKrq-pcmLbEHr/view?usp=sharing>

### **2. Analisis Anggaran**

Telah dilakukan analisis kebutuhan anggaran (RAB) berdasarkan rencana/program kerja Tahun 2026.

Total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan seluruh rencana/program kerja Tahun 2026 adalah sebesar **Rp1.396.196.000,-**, RAB terlampir:  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RIrJ2zrFaRZ1ldrA-Wdh3x8x6\\_Ro1AuP/edit?usp=sharing&oid=115532310102722163424&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RIrJ2zrFaRZ1ldrA-Wdh3x8x6_Ro1AuP/edit?usp=sharing&oid=115532310102722163424&rtpof=true&sd=true)

Namun demikian, pagu anggaran Pokja Tahun 2026 yang melekat pada KPPN Sorong sebesar **Rp225.279.000,-**, sehingga berpotensi tidak seluruh rencana/program kerja dapat terlaksana.

Berdasarkan analisis, anggaran yang tersedia hanya dapat mendukung:

- **Pelaksanaan 3 (tiga) kali Forum SHEK, dan**
- **3 (tiga) kali perjalanan dinas luar kota/dalam Provinsi Papua Barat Daya. RAB revisi (menyesuaian anggaran) terlampir: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SsaG-UKVUDC37a0B1zkEt-uS1bQ2CDIb/edit?usp=sharing&oid=115532310102722163424&rtpof=true&sd=true>**

### **3. Sumber Pendanaan**

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran Pokja, rencana/program kerja yang belum dapat tercover diusulkan untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui mekanisme **hibah** dari Pemerintah Daerah Papua Barat Daya.

### **4. Mekanisme Administratif**



Seluruh kebutuhan dan permasalahan administratif disampaikan melalui Anggota BPP untuk selanjutnya diteruskan dan dikoordinasikan oleh Pokja.

### **C. Rekomendasi Rundown**

1. Pada saat acara **Pemaparan Materi Rakortek Musrenbang oleh Bappenas** pada tanggal 5 Maret 2026 pukul 15.30-17.30 WIT, rekomendasi:

- Arahan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU).

• Penegasan tugas Pokja sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 19, yaitu membantu BPP dalam:

a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan serta pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sesuai bidang tugas masing-masing;



b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, serta penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh K/L dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

- Penjelasan teknis lebih lanjut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 107 Tahun

2021 Pasal 40–48 terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua berdasarkan RIPPP, RAPPP, dan SIPPP (Sistem Interoperabilitas).

- Perumusan IKU/Target Kinerja Pokja (seluruh bidang) untuk periode 5 (lima) tahun serta capaian tahunan.

- Catatan: Target kinerja tiap Pokja yang disepakati akan dituangkan dalam kontrak kinerja tahunan dan menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran masing- masing Pokja.

- Kesimpulan: Pokja melaksanakan tugas SHEK berdasarkan Perpres Nomor 121

Tahun 2022 Pasal 19 dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 107 Tahun 2021

Pasal 40–

48.

2. Pada saat acara **Diskusi tanggal 5 Maret 2026** pukul 19.00-22.00 WIT poin kesatu, **Diskusi Internal Per Pokja Pembahasan Rencana Kerja 2026** rekomendasi: **pembahasan indikator kinerja utama BPP.**

#### **D. Kesimpulan**

Perlu adanya kesepakatan bersama atas poin A–C sebagai dasar tindak lanjut bersama dalam rangka sinkronisasi program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP.

#### **E. Catatan**

Seluruh poin perlu dikoordinasikan oleh Tim Perumus yang terdiri dari unsur Sekretariat



## PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

### Pelaksanaan Kegiatan Pokja Papua Cerdas

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Cerdas pada laporan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada **triwulan 1 (Jaanuari-Maret) tahun 2026**, dengan rincian kegiatan yang terurai pada Tabel 2. 1 berikut.

Tabel 2. 1 Rincian Kegiatan BP3OKP Pokja Papua Cerdas Triwulan 1 tahun 2026 Bulan Maretr 2026

<b>Kegiatan 1</b>		<b>Waktu Pelaksanaan Kegiatan</b>	
		Hari/Tgl : Rabu, 04 Maret – Minggu 08 Maret 2026	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Surat dan Undangan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura	
	<input type="checkbox"/>	Insidental : Sebutkan Alasannya	
Perintah Kerja	:	Surat Tugas Nomor . . . . . Tanggal . . . . .	
Lokasi Kegiatan	:	<b>Hotel Swissbell Biak Kabupaten Biak - Papua</b>	
Judul Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPP	
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja	
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Tata Kelola Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua	
Pelaksana Kegiatan	:	Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura	
Peserta Kegiatan	:	Anggota Badan Pengarah Papua; Pokja Badan Pengarah Papua	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPP	
Hasil/output Kegiatan	:	1. Penegasan pada prioritas pembangunan pada empat pilar di seluruh tanah Papua, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Papua sehat</b> Fokus : Kesehatan masyarakat, fasilitas medis</li> <li>2) <b>Papua Cerdas</b> Fokus : Pendidikan, teknologi informasi</li> <li>3) <b>Papua Produktif</b> Fokus : Ekonomi, industri perikanan, pariwisata</li> <li>4) <b>Papua Damai</b></li> </ol>	



	<p><b>Fokus</b> : Keamanan, persatuan, kesejahteraan sosial</p>
	<p>2. Pentingnya Koordinasi dan sinkronisasi berjalan tertib, menghasilkan kesepahaman kuat, serta menjauhkan dari perpecahan</p>
	<p>3. Penguatan Kebijakan Interoperabilitas &amp; Dampaknya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tujuan: Mempercepat pelaksanaan OTSUS (Otonomi Khusus) melalui integrasi sistem data.</li><li>2) Hasil Awal: OTSUS tahun 2020 selesai pada Mei (biasanya Juli); setelah kebijakan, penyelesaian dapat lebih cepat.</li><li>3) Pencapaian Kunci:<ul style="list-style-type: none"><li>🏆 Penyediaan sponsor dan detail teknis oleh Direktur.</li><li>🏆 Penggunaan inter kontabilitas untuk percepatan alokasi dana.</li></ul></li></ol>
	<p>4. Penegasan Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan layanan publik melalui pengelolaan dana Otsus.</p>
	<p>5. Perlu dilakukan koordinasi sinkronisasi terkait Potensi perikanan dan pariwisata di Papua, termasuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah</p>
	<p>6. Penegasan dan perhatian terhadap Pengelolaan dan pengembangan Potensi Perikanan di Kabupaten Biak Numfor</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kapasitas produksi ikan: sekitar 819 juta ton (potensi maksimum).</li><li>2) Izin kapal: 200–300 kapal, namun hanya sebagian kecil yang beroperasi secara optimal.</li><li>3) Permintaan: Program nasional diharapkan menyentuh semua izin kapal.</li></ol>
	<p>7. Survei wisatawan: 76 % wisatawan nasional ingin mengunjungi Papua, namun akses terbatas (harus melewati Makassar).</p>
	<p>8. Rencana transportasi: Pengembangan penerbangan Sorong dan jalur darat untuk memperlancar arus wisatawan.</p>
	<p>9. Dukungan dana Otonomi Khusus: Diharapkan dana otonomi kembali penuh seperti tahun sebelumnya untuk memperkuat infrastruktur.</p>
	<p>10. BPP berperan sebagai <i>intellectual development leader</i>, menganalisis isu strategis, merumuskan solusi SHEK, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan</p>
	<p>11. Strategi capaian mengacu pada penetapan target operasional yang diukur lewat indikator indikator seperti partisipasi sekolah, angka rata rata lama sekolah (RLS), dan angka rata rata tinggi sekolah (HLS).</p>
	<p>12. Strategi percepatan: mengidentifikasi program yang dapat dipakai sebagai intervensi (paket A, B, C) serta menetapkan target capaian untuk tahun mendatang</p>



	<p>13. Standar minimal APM yang ditetapkan pemerintah adalah 65 %; nilai di bawah 60 % dianggap kritis (merah).</p>
	<p>14. Program program yang direncanakan sebaiknya program yang sudah ada di tingkat nasional, kemudian disesuaikan dengan kondisi provinsi, dan Setiap program harus memiliki target capaian yang terukur (mis. peningkatan APM menjadi <math>\geq 65\%</math> dalam satu tahun).</p>
	<p>15. Prioritas penggunaan dana OTSUS pada pembangunan Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan proyek proyek strategis daerah</p>
	<p>16. Kendala Penyaluran Dana OTSUS melalui APBD sering tertunda karena tidak sinkron dengan RAP.</p>
	<p>17. Permasalahan Utama dalam Pembangunan Papua :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Keamanan – Ancaman keamanan menghambat implementasi proyek.</li><li>2) Kesenjangan Kesejahteraan – Indikator makro pembangunan di Papua lebih rendah dibandingkan rata rata nasional.</li><li>3) Kendala Budaya &amp; Lahan – Konflik kultur lokal dan masalah lahan menghambat pembangunan fisik.</li><li>4) Biaya Konstruksi Tinggi – Misalnya, biaya semen di wilayah Wabungan &gt; 1 miliar, jauh di atas standar Jawa.</li><li>5) Perubahan SDM &amp; Kepemimpinan – Rotasi pejabat mengganggu kontinuitas proyek.</li></ol>
	<p>18. Tantangan Data dan Sistem Administratif, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Sistem yang terpisah: SIKD, SIPB, dan sistem lain mengharuskan input ganda.</li><li>2) Tidak sinkron: RAB vs. APBD tidak konsisten; sering harus bongkar pasang data.</li><li>3) Keterlambatan laporan: Data yang tidak ter integrasi menyebabkan penundaan keseluruhan dana.</li><li>4) Keterbatasan akses: Pengguna daerah tidak memiliki hak akses <i>real time</i> ke data keuangan pusat.</li></ol>
	<p>19. Evaluasi dan Pencapaian 2023 2024</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) RAP selesai: 44 daerah (Papua Barat, Tengah, dll.) telah menyelesaikan RAP dan APBD tanpa revisi lebih lanjut.</li><li>2) Kecepatan penyaluran: Dana OTSUS dapat dicairkan mulai Februari 2024, mempercepat realisasi proyek.</li><li>3) Penggunaan dana: Fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur; laporan realisasi kini lebih akurat berkat integrasi sistem.</li></ol>



	<p>20. Sinkronisasi PP 107, PP 21, PMK 33 memastikan sanksi bagi daerah yang tidak melaporkan tepat waktu.</p> <p>21. Manajemen kinerja adalah proses mengukur, melaporkan, dan meningkatkan hasil kerja organisasi secara terstruktur sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Setiap lembaga pemerintah wajib memiliki kinerja organisasi yang menjadi dasar penilaian kinerja masing masing pegawai.</li><li>2) Kinerja organisasi ditentukan oleh nilai kinerja pegawai yang dihasilkan melalui indikator indikator terukur.</li><li>3) Pengukuran kinerja harus dapat diukur, dikuantifikasi, dan dokumentasikan untuk mengetahui posisi organisasi (misalnya Papua Barat vs. Papua).</li></ol> <p>22. Proses Pengukuran dan Instrumen Capaian Kinerja dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengumpulan Data<ul style="list-style-type: none"><li>⊗ Dokumen perencanaan (DATRAP, RAB tahunan)</li><li>⊗ Analisis kondisi internal (sumber daya, tenaga) dan eksternal (geografis, regulasi)</li></ul></li><li>2) Analisis SWOT<ul style="list-style-type: none"><li>⊗ Strengths: sumber daya internal, keahlian teknis.</li><li>⊗ Weaknesses: keterbatasan staf, proses administrasi.</li><li>⊗ Opportunities: kebijakan pusat, dukungan stakeholder.</li><li>⊗ Threats: faktor keamanan, stabilitas politik.</li></ul></li><li>3) Penyusunan PERDA Strategi<ul style="list-style-type: none"><li>⊗ Menetapkan sasaran strategi dan ideologi sasaran.</li><li>⊗ Dirumuskan dalam kontrak (nerda/serdek) untuk dijalankan tiap tahun.</li></ul></li><li>4) Pelaporan<ul style="list-style-type: none"><li>⊗ Laporan ke pusat (K/L) melalui <i>policy brief</i> dan laporan berkala.</li><li>⊗ Dokumentasi kegiatan (meeting, kunjungan, S.H.I.K) harus tercatat dalam laborat.</li></ul></li></ol> <p>23. Penyusunan Draf Program Pokja Papua Cerdas berdasarkan Isu Nasional dan Lokal Provinsi di seluruh tanah Papua.</p>
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Rec Out 1 :</b><ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>Pilar Papua Sehat</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Memperkuat pelayanan kesehatan dasar terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.</li><li>b. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan serta pemerataan distribusi tenaga medis.</li></ol></li></ol></li></ol>



- c. Mengembangkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik di wilayah yang belum terlayani secara optimal.
- d. Memperkuat program pencegahan penyakit serta peningkatan gizi masyarakat

**2) Pilar Papua Cerdas**

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- b. Memperkuat kompetensi guru serta pemerataan tenaga pendidik di wilayah Papua.
- c. Mengembangkan pendidikan vokasi dan keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah.
- d. Meningkatkan akses teknologi informasi dan digitalisasi pendidikan.

**3) Pilar Papua Produktif**

- a. Mengembangkan sektor ekonomi berbasis potensi lokal seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.
- b. Meningkatkan akses permodalan dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal.
- c. Mendorong pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian.
- d. Mengembangkan destinasi wisata unggulan berbasis budaya dan alam Papua.

**4) Pilar Papua Damai**

- a. Memperkuat pendekatan dialog dan rekonsiliasi dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.
- b. Meningkatkan program pemberdayaan sosial bagi masyarakat.
- c. Memperkuat kerukunan antar masyarakat dan tokoh adat, agama, serta pemerintah.
- d. Mengembangkan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan.

- 
2. **REC OUT 2** : Arahan BP3OKP menekankan pentingnya koordinasi yang tertib, sinkronisasi kebijakan, serta kesepahaman antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Hal ini diperlukan agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif, terarah, dan mendukung stabilitas sosial serta persatuan masyarakat.

**1) Secara internal :**

BP3OKP perlu memperkuat fungsi sinkronisasi, koordinasi, evaluasi, dan pengawasan kebijakan percepatan pembangunan agar seluruh program pembangunan di Papua Selatan berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

**2) Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan 4 Kabupaten.**

**(1) Penguatan Koordinasi Pemerintahan**

---



Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama pemerintah kabupaten perlu memperkuat koordinasi lintas daerah dalam pelaksanaan program pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kebijakan.

**(2) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan**

Pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua serta prioritas pembangunan nasional.

**(3) Penguatan Komunikasi dan Kesepahaman Antar Pemangku Kepentingan**

Pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun kesepahaman dalam pelaksanaan pembangunan.

**(4) Penguatan Stabilitas Sosial dalam Pembangunan**

Program pembangunan perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang menjaga persatuan, harmoni sosial, dan stabilitas keamanan masyarakat.

3. Menyusun strategi melalui proses Bisnis Pembangunan dalam penyelerasan RKPD → APBD, melalui :

- 1) Perencanaan RKPD → Penyusunan rencana kerja daerah.
- 2) Musrenbang → Musyawarah perencanaan berbasis data terintegrasi.
- 3) Pembahasan RAP Awal → Validasi kebutuhan dana dengan OTSUS.
- 4) Penyusunan APBD → Sinkronisasi RAP dan APBD; penetapan final.
- 5) Penyaluran Dana → Melalui Interoperabilitas ; pengawasan melalui dashboard

4. Solusi dan Inisiatif Interoperabilitas menghadapi tantangan dan sistem administratif, yaitu :

- 1) Pengembangan Platform Terpadu – Menghubungkan SIKD, SIPB, dan ARAP ke satu dashboard.
- 2) Standarisasi Data – Membuat pedoman teknis untuk format input (mis. kode akun, satuan).
- 3) Automasi Alur Kerja – Jika RAP belum selesai, proses selanjutnya otomatis terblokir (validasi berantai).
- 4) Pelatihan SDM – Program *capacity building* untuk aparat daerah dalam penggunaan sistem baru.



	<p>5) Regulasi Pendukung – Pengesahan Undang Undang Khusus dan PP yang mewajibkan integrasi data.</p> <hr/> <p>5. <b>Rec out 20 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Penegasan kewajiban pelaporan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan PP 107, PP 21, dan PMK 33</li><li>2) Penerapan sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan tepat waktu</li><li>3) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaporan daerah</li><li>4) Penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam pengawasan pelaporan</li><li>5) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan laporan</li><li>6) Evaluasi berkala terhadap kepatuhan pelaporan daerah</li></ol>
Rencana Tindaklanjut	<p>:</p> <p>1. <b>RTL Out 1 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>Pilar Papua Sehat</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan di daerah terpencil.</li><li>b. Program penempatan tenaga kesehatan berbasis afirmasi untuk wilayah Papua.</li><li>c. Penguatan layanan kesehatan berbasis teknologi (telemedicine).</li><li>d. Pelaksanaan program penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat.</li></ol></li><li>2) <b>Pilar Papua Cerdas</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Program peningkatan kualitas dan distribusi guru di daerah terpencil.</li><li>b. Pengembangan sekolah vokasi berbasis potensi lokal.</li><li>c. Penyediaan infrastruktur internet dan perangkat teknologi pendidikan.</li><li>d. Program beasiswa bagi putra-putri Papua untuk pendidikan tinggi dan pelatihan keahlian.</li></ol></li><li>3) <b>Pilar Papua Produktif</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Penguatan program pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.</li><li>b. Pembangunan infrastruktur pendukung sektor perikanan dan pariwisata.</li><li>c. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat Papua.</li><li>d. Promosi pariwisata Papua secara nasional dan internasional.</li></ol></li><li>4) <b>Pilar Papua Damai</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Pelaksanaan program dialog dan rekonsiliasi antar kelompok masyarakat.</li><li>b. Penguatan program pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan budaya lokal.</li></ol></li></ol>



- c. Peningkatan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
- d. Penguatan peran tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

## 2. RTL OUT.2 :

### 1) Internal BP3OKP

- (1) Menyelenggarakan rapat koordinasi berkala dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan.
- (2) Menyusun peta program prioritas pembangunan Papua Selatan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan secara periodik.
- (4) Menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di Papua Selatan.
- (5) Memperkuat fungsi Sekretariat BP3OKP sebagai pusat koordinasi data dan informasi pembangunan Papua.

### 2) Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan 4 Kabupaten.

#### (1) Penguatan Koordinasi Pemerintahan

- ☑ Membentuk forum koordinasi pembangunan daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
- ☑ Melaksanakan rapat koordinasi pembangunan secara berkala untuk menyelaraskan program prioritas..

#### (2) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

- ☑ Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan program percepatan pembangunan Papua.
- ☑ Mengintegrasikan program prioritas dalam perencanaan pembangunan kabupaten dan provinsi..

#### (3) Penguatan Komunikasi dan Kesepahaman Antar Pemangku Kepentingan

- ☑ Melaksanakan dialog pembangunan daerah secara inklusif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
- ☑ Mengoptimalkan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga persatuan masyarakat..

#### (4) Penguatan Stabilitas Sosial dalam Pembangunan



- ✓ Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal.
- ✓ Mengembangkan kegiatan yang memperkuat solidaritas dan persatuan masyarakat.

3. **Pisahkan OTSUS dari APBD umum** → Membentuk **APBD-OTSUS** terpisah untuk transparansi dan monitoring, dengan tujuan :

- 1) Menghindari campuran alokasi dana antara dana khusus (OTSUS) dan dana umum yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan.
- 2) Mempermudah penyaluran cepat melalui interkontabilitas karena tiap sumber dana memiliki label yang jelas.

4. **Standarisasi kode wilayah** pada semua sistem untuk menghindari duplikasi data.

5. **Perkuat koordinasi BP3OKP** sebagai pusat sinkronisasi regulasi, evaluasi, dan pelaporan.

6. **Terapkan mekanisme sanksi** bagi daerah yang tidak melaporkan tepat waktu (berdasarkan PP 107, PP 21, PMK 33).

7. **Perluas pelatihan digital** bagi semua pejabat daerah agar dapat mengoperasikan dashboard dan sistem interoperabilitas secara mandiri.

8. **RTL Out 20 :**

- 1) Menyusun pedoman teknis atau surat edaran yang mengintegrasikan ketentuan pelaporan, termasuk waktu, format, dan mekanisme penyampaian laporan
- 2) Menetapkan mekanisme sanksi secara bertahap seperti teguran tertulis, penundaan penyaluran anggaran, atau evaluasi kinerja daerah
- 3) Mengembangkan sistem pelaporan terintegrasi berbasis digital yang dapat memantau kepatuhan pelaporan daerah secara real time
- 4) Melakukan rapat koordinasi berkala dan sinkronisasi data pelaporan antara kementerian/lembaga terkait
- 5) Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, serta pendampingan kepada pemerintah daerah terkait kewajiban pelaporan
- 6) Menyusun laporan evaluasi kepatuhan pelaporan daerah secara periodik dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan



Dokumentasi



**RAPAT KOORDINASI  
SINKRONISASI  
PROGRAM PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN PAPUA  
SESUAI RAPP**

Biak, 5-7 Maret 2026



Next Keg...2


<b>Kegiatan 2</b>	<b>Waktu Pelaksanaan Kegiatan</b> Hari/Tgl : Rabu, 11 Maret 20226 Pukul : 10.00 – 14.00	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
	<input type="checkbox"/>	Undangan .....
	<input checked="" type="checkbox"/>	Insidental : <a href="#">Kunjungan Koordinasi Komite Seni Budaya Nusantara (KBSN) Provinsi Papua Selatan Periode 2025-2030</a>
Perintah Kerja	:	Insendintil Meeting
Lokasi Kegiatan	:	<b>Aula KPPN/BP3OKP</b>
Judul Kegiatan	:	Kunjungan Koordinasi dan Perkenalan Pengurus KBSN Prov. Papua Selatan



Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas dan Papua Produktif
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Seni dan Budaya
Pelaksana Kegiatan	:	KSBN & BP3OKP/BPP Provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas dan Badan Pengurus KSBN Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Koordinasi dan Perkenalan dari KSBN Provinsi Papua Selatan
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkenalan badan pengurus dan BP3OKP Menerima Dokumen Akta Pendirian beserta Lampiran dokumen.</li><li>2. Arahan Anggota BPP terkait :<ol style="list-style-type: none"><li>1) pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah (KBD) yang akan di adakan di Jayapura pada tanggal 26-29 Agustus 2026</li><li>2) Kontribusi dan keterlibatan KSBN dalam peningkatan seni budaya PPS dan dalam dalam menghadapi pelaksanaan KBD, diantaranya melalui pendampingan :<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Penyusunan kamus bahasa daerah</li><li>(2) Membuat cerita dongeng dan cerita rakyat dalam bahasa daerah dalam komik dll. [Tokoh Kepahlawanan]</li><li>(3) Lomba pidato dalam bahasa daerah</li><li>(4) Melakukan kajian terkait etnografi Papua khususnya wilayah Papua Selatan (Budaya, adat istiadat, bahasa dll).</li><li>(5) Mengadakan seleksi pemilihan peserta seni melalu kompetisi tari-tarian dari 4 kabupaten yang akan dikutsertakan dalam KBD.</li><li>(6) Penyusunan regulasi terkait kewajiban penggunaan bahasa daerah di kalangan perempuan terutama mama-mama, karena bahas daerah adalah bahas ibu.</li></ol></li><li>3) Perhatian terkait arahan presiden tentang kepemilikan saham terhadap tanah-tanah adat, diwajibkan pemilik ada adalah pemilik saham.</li><li>4) Untuk pertemuan selanjutnya bersama KSBN, sebaiknya sertakan MRP, DP-K, DPR-P.</li><li>5) Persiapkan kontingen untuk kegiatan lomba budaya di Prancis</li><li>6) Perlu adanya pemeriksaan penggunaan Dana BOS pada satuan pendidikan</li></ol></li></ol>



		<p>7) Verifikasi data student body pada semua satuan pendidikan guna memaksimalkan anggaran pendidikan di Provinsi Papua Selatan</p> <p>3. Arahan Anggota Pokja Papua Cerdas BPP PPS terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Diharapkan KSBN dapat menjadi salah satu inisiator terkait pendirian dan pembangunan Museum Budaya PPS yang berskala internasional. Dan</li><li>2) KSBN dapat menjadi koordinator terkait pengembangan seni dan budaya melalui sanggar-sanggar yang sudah ada dan atau diperlukan perlu untuk membangun sanggar pada daerah/ lokasi yang belum ada sanggar seni budaya.</li></ol> <p>4. Pengurus Komite Seni Budaya Nasional (KSBN)_Ibu Ester [Bendahara] :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Komite Seni Budaya Nasional (KSBN) merupakan organisasi Perkumpulan yang disahkan melalui Akta Notaris</li><li>2) Badan Pengurus KSBN pada Provinsi Papua Selatan telah dilantik 01 Agustus 2025.</li><li>3) Sebelumnya telah ada pengurus KSBN namun tidak berjalan.</li><li>4) KSBN merupakan salah satu lembaga yang diwadahi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan</li><li>5) Terkait anggaran operasional sampai saat ini tidak ada sumber anggaran yang pasti, namun badan pengurus telah mengajukan Proposal pembiayaan kepada Dinas Pendidikan provinsi, tetapi belum ada tindaklanjut realisasi pemenuhan proposal.</li></ol> <p>5. Pengurus KSBN_Pak KarliImkota [Bid. Pendidikan] :</p> <p>Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang pendidikan tanpa adanya biaya yang bersumber dari KSBN :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Lomba-lomba yang melibatkan jenjang pendidikan SD-SMA</li><li>2) Adanya dana dari kementerian untuk SMA N.3 dan SMK N. 3 masing-masing Rp. 10.000.000,- untuk peningkatan kearifan lokal melalui satuan pendidikan, yang telah direalisasikan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :</li><ol style="list-style-type: none"><li>(1) Kajian dan pemberdayaan ulat sagu, lumpur putih, gatsi dll</li><li>(2) Hasil kajian muatan lokal diintegrasikan ke dalam kurikulum lokal</li><li>(3) Pembuatan papan nama sekolah dalam 3 bahasa [Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Marind], namun masih menggunakan bahan kayu</li></ol></ol>
--	--	---

		<p>sehingga sudah rapuh. Hal ini disebabkan karena tidak adanya biaya.</p> <p>(4) Penyusunan bahan ajar berbasis kearifan lokal marind.</p> <p>Semua kegiatan yang laksanakan mendapat apresiasi positif dari kementerian, dan diarahkan untuk ditindaklanjuti dalam program selanjutnya.</p> <p>3) Terkait dengan adanya program yang direncanakan namun tidak ada sumber anggarannya yaitu : Kunjungan pembelajaran pada pusat penyulingan kayu putih.</p> <p>4) Peningkatan kompetensi Siswa disemua jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan peningkatan pemanfaatan kearifan loka dan perkembangan teknologi global.</p>
Rekomendasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pertemuan koordinasi selanjutnya terkait penajaman tugas, fungsi dan peran KSBN di PPS, wajib melibatkan MRP, DPR-P, DPR-K</li> <li>2. KSBN segera siapkan Program dan Rencana Kegiatan Anggaran untuk menindaklanjuti arahan Anggita BPP. Dan program berkelanjutan KSBN untuk diusulkan ke pihak Pemerintah daerah PPS.</li> <li>3. Pendampingan akan dilakukan oleh BP3OKP melalui Pokja Papua Cerdas dan Papua Produktif.</li> </ol>
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buat pertemuan koordinasi lanjutan pada bulan April 2026</li> <li>2. BP3OKP mengarahkan KSBN untuk menyerahkan dokumen persiapan pelaksanaan Kongsres</li> <li>3. BP3OKP mengarahkan KSBN menyusun dan menyerahkan Grand design / Master plan pengembangan seni budaya di Provinsi Papua Selatan</li> </ol>
Dokumentasi	:	



Next Keg...3

<b>Kegiatan 3</b>	<b>Waktu Pelaksanaan Kegiatan</b> Hari/Tgl : Kamis, 12 Maret 20226 Pukul : 15.00 – 17.30	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
	<input type="checkbox"/>	Undangan .....
	<input checked="" type="checkbox"/>	Insidental : <a href="#">Kunjungan Koordinasi Badan Pengurus Mata Garuda Provinsi Papua Selatan</a>
Perintah Kerja	:	Insidental Meeting
Lokasi Kegiatan	:	<b>Ruang Kerja Pokja BPP Papua Selatan</b>
Judul Kegiatan	:	Kunjungan Koordinasi Eksistensi dan Program Kerja Pengurus Mata Garuda Provinsi Papua Selatan Papua Selatan
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Percepatan Pendidikan Papua melalui kerjasama dengan mitra strategis [Mata Garuda]
Pelaksana Kegiatan	:	Mata Garuda & BP3OKP/BPP Provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas dan Badan Pengurus Mata Garuda Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Koordinasi eksistensi dan Rencana Program Kerja Mata Garuda
Hasil Kegiatan	:	1. Mata garuda merupakan mitra strategis dalam program percepatan pendidikan di Papua Selatan, khususnya dalam memberikan motivasi dan support bagi peserta didik dan calon mahasiswa OAP dalam melanjutkan studi dengan beasiswa yang bersumber dari LPDP
	:	2. Sekretariat Mata Garuda sebaiknya berada pada lingkungan KPPN atau dimana saja sesuai yang dibutuhkan.

		3. BP3OKP menjadi prioritas dikunjungi Mata Garuda untuk berkoordinasi terkait keberadaan Mata Garuda Provinsi Papua Selatan
		4. Rencana akan ada seminar besar terkait dengan tuis Mata Garuda
Rekomendasi	:	1. Membuat MoU/MoA antara BP3OKP dan Mata Garuda
		2. BP3OKP mengkoordinasikan terkait sekretariat Mata Garuda pada Kanwil DJPB Prov. Papua
		3. Mata Garuda akan dilibatkan pada setiap pertemuan yang diadakan oleh Pokja Papua Cerdas BP3OKP {Baik sebagai Narasumber/Pemateri maupun Peserta]
		4. Mata Garuda Perlu menyusun perencanaan dan strategi dalam melaksanakan program sosialisasi kepada peserta didik dan calon mahasiswa tentang manfaat dn dampak dari beasiswa LPDP dalam meningkatn kualitas SDM Provinsi Papua Selatan.
		5. Salah satu regulasi yang perlu dijadikan pedoman penyusunan program Mata Garuda adalah Perpres 24 Tahun 2023 tentang RIPPP.
Rencana Tindaklanjut	:	1. Triwulan 2 - Mempelajari dan menandatangani MoU/MoA
		2. Integrasi dalam program kegiatan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi dan 4 Kabupaten untuk memperkenalkan mata garuda dalam salah satu agenda Pokja Papua Cerdas BPP-PPS
		3. Pelaksanaan evaluasi penerima beasiswa Afirmasi Provinsi Papua Selatan
Dokumentasi	:	



## PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan yang terurai pada Tabel 2. 1 sebagai berikut :

1. **Pembangunan Papua:** Fokus utama dalam pembangunan Papua melibatkan empat pilar: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keamanan. Pentingnya koordinasi antar pihak terkait dan pengelolaan dana yang efektif menjadi kunci dalam percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus (OTSUS). Pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian tantangan terkait keamanan, kesenjangan kesejahteraan, dan biaya konstruksi, menjadi prioritas utama. Pengelolaan data yang baik juga diperlukan untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan proyek.
2. **Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN):** KSBN berfokus pada pengembangan seni dan budaya di Papua Selatan, dengan berbagai kegiatan, termasuk penyusunan kamus bahasa daerah, lomba pidato, dan kajian etnografi. Selain itu, KSBN juga



akan berperan dalam pendirian Museum Budaya PPS dan pengembangan sanggar seni. Namun, kendala pendanaan menjadi tantangan utama dalam merealisasikan program-program tersebut. KSNB terus berupaya meningkatkan pengelolaan anggaran agar lebih efektif dalam mendukung pendidikan dan budaya.

3. **Mata Garuda:** Mata Garuda berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung program pendidikan di Papua Selatan, dengan fokus pada pemberian beasiswa LPDP untuk peserta didik dan calon mahasiswa OAP. Mata Garuda juga berkoordinasi dengan BP3OKP untuk memperkuat keberadaannya di Papua Selatan dan berencana mengadakan seminar besar untuk membahas tugas serta peranannya dalam pendidikan. Koordinasi yang baik dan pengelolaan anggaran yang tepat akan mempercepat realisasi program pendidikan tersebut.

### 3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah **Saran Strategis** untuk ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan:

1. **Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi:** Disarankan agar semua pihak terkait, baik pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga-lembaga pendidikan dan budaya, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana, serta mempercepat alokasi dana yang tepat guna dan efektif.
2. **Pengelolaan Dana yang Lebih Efektif:** Untuk memaksimalkan hasil pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan dan budaya, disarankan agar anggaran yang telah diajukan oleh lembaga-lembaga seperti KSNB dan Mata Garuda segera disetujui dan direalisasikan. Pengelolaan dana yang efisien, transparan, dan berkelanjutan akan sangat mendukung kelancaran program-program yang sudah direncanakan.
3. **Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia:** Pengembangan infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan, serta seni dan budaya harus menjadi prioritas. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik di bidang pendidikan maupun budaya, perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran program-program yang ada.



4. **Pemberdayaan Komunitas Lokal:** Diperlukan lebih banyak upaya dalam pemberdayaan masyarakat setempat, seperti pemberian pelatihan kepada perempuan dan anak-anak mengenai pentingnya penggunaan bahasa daerah serta kearifan lokal dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Hal ini akan memperkuat keberagaman budaya dan meningkatkan rasa memiliki terhadap warisan budaya daerah.
5. **Evaluasi dan Monitoring:** Disarankan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan dan budaya yang telah dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang telah dicapai dan hambatan-hambatan yang ada. Evaluasi ini akan memberikan informasi penting untuk perbaikan dan penyesuaian strategi yang lebih tepat ke depannya.
6. **Peningkatan Akses Pendidikan:** Dalam mendukung program pendidikan, khususnya bagi OAP, perlu ada peningkatan akses terhadap informasi mengenai beasiswa dan peluang pendidikan tinggi. Mata Garuda dan lembaga lainnya dapat memperkuat sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa Papua dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.



## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN POKJA PAPUA SEHAT BP3OKP

### PROVINSI PAPUA SELATAN BULAN MARET 2026

#### A. Ringkasan Eksekutif

Pada tanggal 5-6 Maret 2026, Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan di Biak Numfor

Kegiatan ini merupakan forum strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Papua antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung implementasi percepatan pembangunan di sektor kesehatan.

Fokus utama kegiatan meliputi:

- Sinkronisasi RAPPP dengan RPJMD daerah
- Penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus)
- Penyusunan rencana kerja Pokja tahun 2026
- Penetapan komitmen kerja Pokja Papua Sehat

Hasil kegiatan menegaskan bahwa peran Pokja Papua Sehat semakin strategis sebagai akselerator transformasi kesehatan di tanah Papua, dengan penekanan pada peningkatan tata kelola, efektivitas penggunaan dana Otsus, serta pencapaian dampak nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).

#### B. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua;



4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041;
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur;
8. Peraturan Menteri PPN/Bappenas tentang Musrenbang Otonomi Khusus Papua;
9. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan BPP;
10. Peraturan Ketua BPP Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPP;
11. Keputusan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan dan Tugas Pokja;
12. Keputusan Ketua BPP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Pokja.

### **C. Ruang Lingkup**

Kegiatan mencakup:

1. Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi RAPPP
2. Diskusi lintas Pokja dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026
3. Pembahasan tata kelola Dana Otsus dan sistem interoperabilitas
4. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah melalui RAPPP dan RPJMD
5. Penetapan komitmen kerja Pokja Papua Sehat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5–6 Maret 2026 di Swiss-Belhotel Biak Numfor dengan melibatkan kementerian/lembaga pusat, BP3OKP, serta Pokja lintas bidang.

### **D. Kegiatan Strategis Badan Pengarah Papua**

#### **1. Sinkronisasi Arah Kebijakan RAPPP**

Pada hari pertama, disampaikan arahan strategis bahwa RAPPP merupakan instrumen utama dalam mengarahkan prioritas pembangunan Papua.

Pokok hasil:



- RAPPP menjadi acuan utama perencanaan daerah
- Perlunya indikator kinerja yang jelas dan terukur
- Program harus menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua

Selain itu, Pokja diminta menyusun program kerja yang selaras dengan RAPPP dan RPJMD, serta berbasis pada permasalahan daerah.

## **2. Penguatan Tata Kelola Dana Otsus**

Pada hari kedua, dibahas kebijakan interoperabilitas Dana Otsus yang bertujuan memperbaiki tata kelola melalui integrasi sistem.

Permasalahan utama:

- Ketidaksinkronan data
- Keterlambatan penyaluran
- Belum optimalnya dampak program

Solusi:

- Integrasi sistem SIPPP, SIPD, dan SIKD
- Penguatan monitoring berbasis data
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Peran Pokja Papua Sehat:

- Mengawal penggunaan dana kesehatan
- Memastikan output dan outcome program
- Melakukan evaluasi berbasis data lapangan

## **3. Sinkronisasi Perencanaan RAPPP dan RPJMD**

Bappenas menegaskan pentingnya:

- Keselarasan RAPPP dengan RPJMD
- Peran Musrenbang Otsus sebagai instrumen utama perencanaan
- Integrasi seluruh program dalam sistem SIPPP

Pokja Papua Sehat didorong untuk:

- Terlibat aktif dalam Musrenbang Otsus



- Memberikan rekomendasi berbasis hasil evaluasi

#### **4. Komitmen Strategis Pokja Papua Sehat**

Pokja Papua Sehat menetapkan komitmen sebagai berikut:

1. Mengawal implementasi RAPPP dan RIPP
2. Menyusun rencana strategis 2026–2029
3. Menyusun rencana kerja tahunan
4. Memperhatikan:
  - Infrastruktur kesehatan
  - SDM kesehatan
  - Tata kelola layanan
5. Mengembangkan Satu Data Papua Sehat
6. Memperkuat forum stakeholder
7. Berperan sebagai akselerator transformasi kesehatan
8. Memastikan keberpihakan program untuk OAP
9. Mendorong efektivitas Dana Otsus
10. Merekomendasikan penguatan jaminan kesehatan daerah
11. Mengawal mandatory spending kesehatan
12. Terlibat dalam Musrenbang Otsus
13. Melakukan monitoring dan evaluasi triwulanan

#### **E. Kesimpulan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

##### **Kesimpulan**

1. RAPPP menjadi instrumen utama arah pembangunan Papua
2. Tata kelola Dana Otsus masih perlu perbaikan
3. Peran Pokja Papua Sehat semakin strategis
4. Komitmen Pokja menjadi dasar kerja ke depan

##### **Rekomendasi**

1. Penguatan monitoring berbasis data
2. Integrasi sistem Satu Data Papua Sehat



3. Peningkatan koordinasi lintas sektor
4. Pengawasan penggunaan Dana Otsus

### **Tindak Lanjut**

1. Penyusunan Renstra Pokja 2026–2029
2. Penyusunan rencana kerja tahunan
3. Pelaksanaan moneyv triwulanan
4. Keterlibatan aktif dalam Musrenbang Otsus

### **F. Penutup**

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Anggota dan Pokja BP3OKP Provinsi Papua Selatan bulan Maret 2026 disusun sebagai bahan evaluasi dan dasar penguatan peran Pokja Papua Sehat dalam mendukung percepatan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

### **G. Dokumentasi**





## **BAB III PENUTUP**

### **3.3 Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sepanjang bulan Februari 2026, Anggota BP3OKP telah melakukan tugas dan fungsi SHEK sebagai berikut:

1. Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua pada tanggal 9-10 Februari 2026
2. Diskusi bersama DPD RI di Jakarta tanggal 12 Februari 2026, BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan dan Papua Barat Daya diskusi beberapa hal strategis berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS, Persentase Dana OTSUS, Masalah MBG, Koerasi Merah Putih dan Fungsi Pengawasan yang efektif di Daerah berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS agar tepat sasaran dan efektif dirasakan oleh Orang Asli Papua
3. Diskusi dengan Dirtjen Bina Marga di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2026, Diskusi dengan Dirjen Bina Marga PU RI berkaitan dengan Konektivitas Pembangunan Jalan Trans Papua dari Merauke – Sorong, dengan prioritas daerah-daerah perbatasan dan jalan-jalan strategis Nasional yang dikerjakan langsung oleh BPJN Bina Marga di daerah
4. Diskusi Strategis Penguatan SDM Papua Selatan bersama Mata Garuda Papua Selatan
5. **Diskusi tanggal 5 Maret 2026** pukul 19.00-22.00 WIT poin kesatu, **Diskusi Internal Per Pokja Pembahasan Rencana Kerja 2026** rekomendasi: **pembahasan indikator kinerja utama BPP**. Perlu adanya kesepakatan bersama atas poin A–C sebagai dasar tindak lanjut bersama dalam rangka sinkronisasi program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP.



### 3.2 Penutup

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai refleksi dan rangkuman atas dinamika serta capaian kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada bulan Februari 2026. Beragamnya kegiatan yang terlaksana dengan baik adalah buah dari sinergi, dedikasi, dan komitmen bersama seluruh pihak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

- Seluruh Pimpinan Pemerintah Pusat yang telah membuka ruang dialog dan koordinasi.
- Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Sekretariat BP3OKP serta seluruh Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah bekerja keras.

Kami menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan Papua Selatan yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai masih panjang. Semoga momentum dan jejaring kerja yang telah terbangun pada bulan ini menjadi landasan yang kokoh untuk aksi-aksi kolaboratif yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata di masa-masa mendatang. BP3OKP Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus menjadi bagian aktif dari solusi, mengawal dengan sungguh-sungguh setiap proses percepatan pembangunan untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua”.

Merauke 10 Maret 2025

**Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan**

**Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd. M.Si, MRSC**

**NIP: 999920240117145257**